

ABSTRAK

Sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kearah yang lebih serius akan saling mengikatkan diri dan salah satu pihak akan memberikan janji kawin. Janji kawin biasanya disampaikan secara lisan dan apabila pihak tersebut ingkar akan janjinya, akan sulit untuk diminta pertanggungjawaban. Janji kawin yang diingkari pasti menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil khususnya bagi pihak wanita, dengan itu ia menggugat pihak laki-laki untuk mengganti kerugian dan pemulihan nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ingkar janji kawin sebagai dua klasifikasi gugatan yang berbeda dan indikator seorang hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus juga digunakan dalam penelitian ini karena akan meninjau lebih jauh putusan pengadilan terkait janji kawin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa janji kawin yang tidak dipenuhi dapat diklasifikasikan menjadi dua dasar gugatan yang berbeda. Pasal 58 ayat (1) dan (2) KUH Perdata mendasari gugatan atas perbuatan ingkar janji kawin tersebut dan juga harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat antara dalam Pasal 1243 KUH Perdata sebagai wanprestasi atau Pasal 1365 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: janji kawin, gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum.

Abstract

A man and a woman who are already in a more serious relationship will tie themselves to each other and one of them will be giving a promise to marry. The promise to marry is usually be delivered verbally and if a party breaks its promises, it's going to be difficult to get an accountability. A promise to marry that had been broken will surely cause material and immaterial losses especially for the woman, so she sues the man to compensate and recover her reputation. This research aims is to identifying the judge's consideration in deciding cases of breaking the promise to marry as two different classifications of lawsuit and what indicators that a judge have in deciding cases for breach of contract and unlawful act. This research is a qualitative normative juridical study using a statutory approach. The case approach is also used in this research because it will review further court decisions related to the promise to marry. The result showed: a promise to marry that had been broken can be classified as two different classifications of lawsuit. Article 58 paragraph (1) and (2) of the Civil Code underlying the lawsuit for breaking the promise to marry also must fulfill the elements contained in Article 1243 of the Civil Code as breach of contract or Article 1365 of the Civid Code as unlawful act.

Keywords: promise to marry, breach of contract, unlawful act.